



RENSTRA TAHUN 2025-2029



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 tepat pada waktunya. Dalam Rancangan Renstra ini memuat dan menjabarkan visi dan misi dari Pemerintah Kabupaten Tabanan, dengan tema “Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggu dan Madani (AUM)

Penjabarannya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, Program dan Kegiatan dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan pokok fungsi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar Rancangan Renstra ini dijadikan pedoman utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya, sehingga memudahkan dalam pelaporan evaluasi kinerja diakhir tahun.

Walaupun Rancangan Renstra ini telah tersusun, kami menyadari bahwa isi dan penyajiannya masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukkan yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan dari Rancangan Renstra ini.

Bagi semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung mulai penyusunan sampai berakhirnya penyusunan Rancangan Renstra ini, diucapkan terima kasih

Tabanan, 19 September 2025
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan



Dra. Ni Wayan Mariati, M.M
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19680926 199403 2 008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Hubungan Antar Dokumen RENSTRA Dengan Dokumen Perencanaan.....	
Pembangunan Lainnya.....	3
1.3 Landasan Hukum.....	4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BABI II	7
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB.TABANAN	7
2.1 Gambaran Pelayanan Pada DPPKB.....	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur DPPKB	7
2.1.2 Sumber Daya DPPKB.....	16
2.1.3 Kondisi Umum Pegawai DPPKB	16
2.1.4 Kondisi Umum Sarana kinerja DPPKB.....	19
2.1.5 Evaluasi Kinerja DPPKB Kabupaten Tabanan.....	21
2.1.6 Tantangan dan Peluang Pengembangan.....	22
2.2 Permasalahan dan Isu strategis DPPKB Kabupaten Tabanan.....	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan DPPKB.....	24
2.2.2 Isu Strategis.....	24
BAB III	31
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	31
3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.1.1 Visi	32
3.1.2 Misi	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Ranwal Renstra DPPKB Tahun 2025-2029	37
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan Ranwal Renstra DPPKB Tahun 2025- 2029...	42
BAB IV	44
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB.....	44
4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan.....	44
4.2 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Ranwal Renstra DPPKB	
tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB.....	54
4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui	
Indikator Kinerja Kunci (IKK)	55
BAB V	55
PENUTUP.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Ranwal Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Rancangan Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama dalam kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis baik dalam skala global, nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

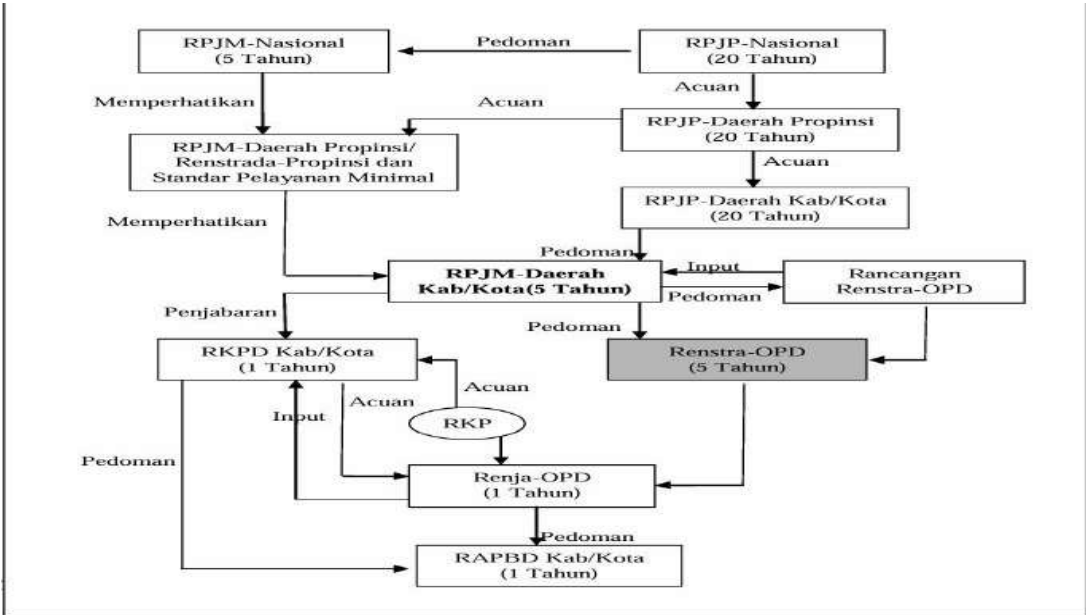
Rancangan Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan dan pemecahan permasalahan di daerah secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Dengan demikian fungsi dari Ranwal Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan 2025-2029, disusun mengacu juga pada RPJMD Kabupaten Tabanan 2025-2029, Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bali 2025-2029, dan RPJPD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2025-2045. Ranwal Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan baik di tingkat nasional, propinsi maupun dengan RPJMD Kabupaten Tabanan. Adapun keterkaitan Ranwal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dengan Renstra Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan Provinsi Bali dan dokumen perencanaan di pusat dapat dilihat dalam gambar 1.1.

Gambar 1.1

Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Hubungan Antar Dokumen RENSTRA Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dokumen Renstra DPPKB Kabupaten Tabanan sangat terkait dengan berbagai dokumen perencanaan di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten seperti : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bali, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabanan 2025-2029.

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis OPD merupakan subsistem dari Perencanaan Daerah oleh karenanya penyusunan Rencana strategi OPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra DPPKB diharapkan :

1. Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang SMART dan konsisten dengan visi, misi program Bupati serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait.
2. Dapat memberikan arah perkembangan daerah sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat dengan demikian mengembangkan 'sense of ownership' dari rencana strategis.
3. Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan.
5. Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan.
6. Dapat dirumuskan focus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah.
7. Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan ke depan yang terarah dan terukur.

1.3 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan RENSTRA DPPKB Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan perubahannya Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali ;
4. Undang-Undang Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali;
5. Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
7. Instruksi Manteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2025-2045.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2023-2032
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025 2045.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk :

- a. Menjabarkan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- b. Menjabarkan visi, misi dan program Bupati di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang tertuang ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan ke dalam rencana pembangunan 5 (lima) tahun yang bersifat indikatif

- c. Menyerasikan dan menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan kependudukan baik di tingkat pusat, daerah serta aspirasi masyarakat.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 adalah :

- a. Menyediakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan agar lebih terarah.
- b. Terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan kependudukan baik antar Pusat, Provinsi dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan .
- c. Terjadinya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penyelenggara, pelaksana dan pengawasan.
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah yang terkait di daerah untuk memahami dalam menentukan program- program pembangunan kesehatan yang ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator- indikator.
- f. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkualitas dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Awal Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 memuat :

Sistematika Penulisan Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN.

- 2.1 Gambaran Pelayanan Pada DPPKB
- 2.2 Permasalahan dan Isu strategis DPPKB

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Rancangan Renstra DPPKB Tahun 2025-2029
- 3.2 Sasaran Rancangan Renstra DPPKB Tahun 2025-2029
- 3.3 Strategi Tujuan Rancangan Renstra DPPKB Tahun 2025- 2029
- 3.4 Arah Kebijakan Ranwal Renstra Dinas DPPKB Tahun 2025- 2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 4.1 Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- 4.2 Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Ranwal Renstra Dinas DPPKB tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) DPPKB
- 4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kungsi (IKK)

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN

2.1 Gambaran Pelayanan Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Pembentukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan didasarkan pada Perda Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Kabupaten Tabanan No. 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas Pokok

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tabanan Nomor 62 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, maka Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah membantu kepala daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

B. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah juga menyebutkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 3 (tiga) bidang. Gambaran Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1

Sruktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabanan



Sumber : Sub.Bagian Umum Dinas Penendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tabanan

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kabupaten berdasarkan pada RPJMD, Renstra dan Renja;
- b. merumuskan Kebijakan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Kabupaten;
- c. melaksanakan kebijakan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Kabupaten;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengendalian urusan administrasi, keuangan, rumah tangga, sarana prasarana, aparatur, organisasi dan kehumasan dinas;
- e. membangun dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral guna mewujudkan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- f. meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku ;
- h. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. menginventarisasi permasalahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- l. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. menyelenggarakan pengendalian internal pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. merumuskan sasaran kesekretariatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, keuangan, hukum dan kepegawaian;
- e. membina, mengarahkan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;

- g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- h. menilai hasil kerja bawahan untuk pedoman pengembangan karier;
- i. menginventarisasi permasalahan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta mengupayakan alternative pemecahannya;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan; dan
- k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan umum;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan pemeliharaan barang pada SKPD;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian, hokum serta mengadakan pembinaan dan peningkatan disiplin pegawai di lingkungan SKPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. member petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman ketentuan yang berlaku;
- f. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta mencari alternative pemecahannya;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- j. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2.2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran;
- c. menyusun laporan keuangan SKPD secara berkala;
- d. menyusun laporan dan akuntansi asset dan barang;
- e. melaksanakan penyusunan program kerja dan perencanaan pada SKPD ;

- f. melaksanakan penyusunan laporan kinerja;
- g. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas-tugas terbagi habis;
- h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- i. membimbing, mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- k. menginventarisasi permasalahan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan serta mencari alternative pemecahannya;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
- m. membuat laporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Kerja Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan berdasarkan Renstra, Renja sebagai Pedoman Kerja;
- b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- c. mengevaluasi hasil kerja, menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan;
- e. melaksanakan Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan;
- f. melaksanakan pemberdayaan tenaga penyuluh KB (PKB / PLKB);
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi penyuluhan, advokasi dan pergerakan;
- h. member bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang penyuluhan, advokasi dan pergerakan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
- j. menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

4. Kepala Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Kegiatan Bidang Keluarga Berencana berdasarkan Renstra dan Renja sebagai Pedoman Kerja;

- b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- c. mengevaluasi hasil kerja, menilai prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
- d. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana;
- e. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusikan alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
- f. melaksanakan Pelayanan Keluarga Berencana;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- j. menyusun laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas :

- a. menyusun Program Kerja Bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga berdasarkan Renstra dan Renja sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas, mengarahkan, membina bawahan dalam pelaksanaan tugas agar pelaksanaannya berjalan lancar;
- c. mengevaluasi hasil kerja, menilai Prestasi Kerja bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pengembangan karier;
- d. menyusun kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan kebijakan teknis urusan Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia dan Rentan, serta Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
- f. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- g. melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan;
- j. menyusun Laporan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

2.1.2 Sumber Daya DPPKB
a. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya penataan peningkatan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana perlu didukung dengan tersedianya sumberdaya yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, alokasi anggaran, SDM dan lain sebagainya. Sumberdaya aparatur yang memadai baik dari sisi jumlah maupun kompetensi memegang peranan penting dalam memberikan Pelayanan Pengendalian penduduk kepada masyarakat, selain itu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi merupakan faktor lain yang berpengaruh dalam upaya peningkatan tersebut. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan pelayanan meliputi :

2.1.3 Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebanyak 73 Orang terdiri dari ASN 22 Orang (PNS 18 Orang dan PPPK 4 orang), Tenaga Kontrak 14 orang (11 orang tenaga administrasi umum dan 3 orang PLKB Non PNS) dan Tenaga Lini Lapangan sebanyak 37 orang merupakan pegawai penyuluh (PKB dan PLKB) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.1 Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1 Orang
2.	Sekretaris	1 Orang
3.	Kepala Bidang	3 Orang
4.	Kepala Sub Bagian	2 Orang
5.	Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan	4 Orang
6.	Staf	7 Orang
7.	Pegawai PPPK	4 Orang
8.	Penyuluh Keluarga Berencana PKB/PLKB (ASN dan Non ASN)	43 Orang
9.	Tenaga Kontark (Administrasi Umum)	11 Orang
Jumlah		76 Orang

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan

Sesuai dengan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka pengisian formasi jabatan struktural dan Fungsional di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 7 orang dan Fungsional hasil penyetaraan Jabatan : 4 orang . Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.2. Jumlah ASN yang menduduki jabatan Struktural dan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

No	Jabatan/Eselon	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Eselon II b	-	1	1
2	Eselon III a	1	-	1
3	Eselon III b	2	1	3
4	Eselon IV a	1	1	2
5	Fungsional hasil Penyetaraan Jabatan	2	2	4
JUMLAH		6	5	11

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan terdapat pegawai yang berstatus golongan IV sebanyak 4 orang, golongan III sebanyak 13 orang, gololgan II sebanyak 1 orang, Pegawai PPPK Golongan IX sebanyak 2 orang dan Pegawai PPPK Golongan V sebanyak 2 orang.

Tabel 2.3. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berdasarkan Pangkat/Golongan

No	PANGKAT/GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	Pembina Utama Muda/IV c	-	1	1
2	Pembina Tingkat I / IV b	1	-	1
3	Pembina /IV a	2	-	2
4	Penata Tingkat I/ III-d	3	6	9
5	Penata/ III-c	-	1	1
6	Penatan Muda Tingkat I/ III-b	-	-	-
7	Penata Muda / III-a	1	2	3
8	Pengatur Tingkat I/ II-d	-	1	1
9	Pengatur/ II-c	-	-	-
10	Pengatur Tingkat I/ II-b	-	-	-
11	Pengatur Muda / II-a	-	-	-
12	Juru / I-c	-	-	-
13	Golongan IX	1	1	2
14	Golongan V	2	-	2
J U M L A H		7	11	22

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan yang ada, maka status pendidikan dengan Strata -2 sebanyak 7 orang, Strata-1 yaitu sebanyak 8 orang sedangkan tingkat SMA sebanyak 3 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.4. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Tabanan berdasarkan Pendidikan.

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SD/SEDERAJAT	0	0	0
2	SMP/SEDERAJAT		-	
3	SMA/SEDERAJAT	0	3	3
4	D-1	0	0	0
5	D-3	0	0	0
6	S-1	3	5	7
7	S-2	4	3	7
8	S-3	-	-	-
J U M L A H		7	11	18

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan umumnya tingkat perguruan tinggi, dengan demikian seharusnya produk perencanaan pembangunan yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.

d. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 7 Pejabat Struktural dan 4 fungsional hasil penyetaraan jabatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan terdapat 7 orang pejabat struktural yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III dan Diklat PIM IV. Sedangkan PKN Tingkat II : 1 orang. Selengkapnya dapat dilihat pada table II.5 dibawah ini

Tabel 2.5. Jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan yang mengikuti penjenjangan

N o	Nama Diklat PIM	Sudah mengikuti Diklat PIM	Belum mengikuti Diklat PIM	Jumla h
1.	PKN Tingkat II	1		1
2.	Spama/Diklat PIM III	3	1	4
3	Adum/Adumla /DiklatPIM IV	1	1	2
Jumlah		5	9	14

2.1.4 Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang dimiliki di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tergolong sudah terpenuhi, apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu Intansi penyelenggara Layanan publik, dengan didukung sarana infrastuktur yang memadai sehingga dapat memenuhi standar pelayanan publik. Sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan untuk menunjang pelayanan dimaksud bisa di lihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL.2.6 Sarana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	Baik
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen (DPPKB)	1	Unit	Baik
3	Bangunan Gedung Kantor (Balai Penyuluh KB Kecamatan)	10	Unit	Baik
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Alokon)	1	Unit	Baik
5	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	1	Unit	Baik
6	Taman Permanen	1	Bidang	Baik
7	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) ISUZU	1	Unit	Baik
8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) Toyota	1	Unit	Baik
9	Sepeda Motor Honda	18	Unit	Rusak Berat
10	Sepeda Motor Honda	32	Unit	Baik
11	Sepeda Motor Suzuki	13	Unit	Baik
12	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat HINO	1	Unit	Baik
13	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat ISUZU	1	Unit	Baik
14	Lemari Besi/Metal LOKAL	3	Buah	Baik
15	Lemari Kayu	7	Buah	Baik
16	Rak Besi RAKITAN	3	Buah	Baik
17	Rak Kayu	13	Buah	Baik
18	Filing Cabinet Besi Broter	2	Buah	Baik
19	Brandkas GALLAND	2	Buah	Baik
20	Lemari Katalog	9	Buah	Baik
21	Lemari Katalog	1	Buah	Kurang Baik
22	Papan Visual/Papan Nama	1	Buah	Baik
23	White Board	1	Buah	Baik
24	Alat Kantor Lainnya	2	Buah	Baik
25	Meja Kerja Kayu	53	Buah	Baik
26	Kursi Kayu	2	Buah	Baik
27	Meja Rapat	35	Buah	Baik
28	Meja Resepsionis	1	Buah	Kurang Baik

29	Kursi Rapat	30	Buah	Baik
30	Kursi Tamu	1	Buah	Baik
31	Kursi Putar	6	Buah	Baik
32	Sofa	1	Buah	Baik
33	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner KRISBOW	1	Buah	Baik
34	A.C. Window GREE	1	Buah	Baik
35	A.C. Window LG	19	Buah	Baik
36	A.C. Window -	1	Buah	Baik
37	A.C. Split LG	1	Buah	Baik
38	Kipas Angin MASPION	1	Buah	Baik
39	Exhaust Fan KRISBOW	4	Buah	Baik
40	Televisi Polytron	1	Buah	Baik
41	Tangga Aluminium	1	Buah	Baik
42	Gordiyin/Kray	1	Buah	Baik
43	Alat Rumah Tangga Lain-lain	8	Buah	Baik
44	Alat Pemadam/Portable SERVVO	1	Buah	Baik
45	Alat Pemadam/Portable Optimex	1	Buah	Baik
46	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
47	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah	Baik
48	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	4	Buah	Baik
49	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	14	Buah	Baik
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah	Baik
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon III Rakitan	10	Buah	Baik
52	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural JAVAN 03	40	Buah	Baik
53	Lemari Arsip Pejabat lainnya Rakitan	3	Buah	Baik
54	Microphone/Wireless MIC Toa	7	Buah	Baik
55	Layar Film/Projector NEC	7	Buah	Baik
56	LCD Monitor	1	Buah	Baik
57	LCD Monitor SONY	20	Buah	Baik
58	Telephone Mobile SAMSUNG	39	Buah	Baik
59	Facsimile Panasonic	1	Buah	Baik
60	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	7	Buah	Baik
61	alat kedokteran keluarga berencana lainnya (dst)	1	Buah	Rusak Berat
62	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	21	Buah	Baik
63	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	Buah	Baik
64	P.C Unit Flatron	6	Buah	Baik
65	P.C Unit HP Pavillion	4	Buah	Baik
66	P.C Unit HP	1	Buah	Baik
67	P.C Unit Dell	3	Buah	Baik
68	P.C Unit NEC	10	Buah	Baik
69	Lap Top HP	10	Buah	Baik
70	Lap Top Dell	1	Buah	Baik
71	Lap Top AXIOO CHROMEBOOK	1	Buah	Baik
72	Lap Top AXIOO MYBOOK PRO F3 (8S5)	1	Buah	Baik
73	Lap Top AZUS NBP1411CJA-EK1227W13	1	Buah	Baik
74	Lap Top ASUS	1	Buah	Baik
75	Note Book Toshiba	1	Buah	Baik

2.1.5 EVALUASI KINERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan memegang peran penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Oleh karena itu ketersediaan dokumen dan data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di semua tingkatan pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa menjadi faktor kunci keberhasilan program-program pembangunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa dalam Perencanaan Pembangunan Daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, masalah potensi sumberdaya daerah maupun informasi tentang kewilayahan lainnya. Selain itu, Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang mengamanatkan pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana.

TABEL.2.7 Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Bidang urusan Pemerintah dan program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		s/dTahun 2025		Kondisi kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				Realisasi Kinerja	Realisasi Juta Rp	Realisasi Kinerja	Realisasi Juta Rp	Realisasi Kinerja	Realisasi Juta Rp	Realisasi Kinerja	Realisasi Juta Rp	Realisasi Kinerja	Realisasi Juta Rp	Target
	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA													

1	Program Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah Kabupate n/Kota	Persenta se Administr asi Perkanto ran yang menduku ng kelancar an tugas dan fungsi PD	100,00%	100 %	4194	100 %	4194	100%	4194						
2	Program Pengend alian Pendudu k	Persenta se Pasanga n Usia Subur menjadi peserta KB aktif	76 %	78 %	36	79 %	200	80 %	250						
3	Program Pembina an Keluarga Berencan a (KB)	Cakupan penyedia an Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	N.A	75%	3740	77 %	3009	79 %	6700	81 %	7500	83 %	7800 -	100 %	4194
4	Program Pemberd ayaan dan Peningka tan Keluarga Sejahtera	Persenta se keluarga yang memiliki pemaha man dan kesadara n tentang fungsi keluarga	74 %	75 %	76	76 %	410	77 %	440	78 %	490	79 %	500	81 %	275
	JUMLAH				8046		7813		11584		12459		12794		

2.1.6 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya-sumber daya yang dimilikinya dan juga dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

Tabel 2.8 Tantangan dan Peluang

PERMASALAHAN	TANTANGAN	PELUANG
Luas Wilayah Garapan yang tidak Sesuai dengan Jumlah Petugas PLKB di Lapangan	Ratio kekurangan Petugas PLKB	Menanggulangi kekurangan PLKB dengan memanfaatkan jaringan institusi masyarakat pedesaan
Tingkat Pendidikan/ Pengetahuan, ekonomi dan social masyarakat Masih Rendah	Kurangnya Sosialisasi yg dilakukan Petugas tentang kebijakan-kebijakan, peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tingkat kesejahteraan kelurga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, remaja dan lansia, serta peningkatan kualitas keluarga masih kurang	Adanya upaya-upaya kemitraan dalam rangka mengimplementasikan kegiatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kualitas kesejahteraan anak.
		Adanya Data mikro keluarga sebagai bahan perencanaan operasional untuk membantu menekan angka kemiskinan, ancaman ledakan bayi serta ancaman gizi buruk dan lost generation pada generasi mendatang
		Banyaknya kelompok kegiatan bagi peningkatan ketahanan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui UPPKS (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera)

2.2 Permasalahan dan Isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan perkiraan kesenjangan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Tabanan diidentifikasi

berdasarkan interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor yang terjadi, baik pada skala lokal, regional maupun global dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Perumusan permasalahan ini penting untuk mendefinisikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran pembangunan dan dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

2.2.2 Isu Strategis

Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (**Bangga Kencana**) yang pelaksanaannya masih di hadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain : (1) belum optimalnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program Bangga Kencana, yaitu terkait penganggaran di Kabupaten, (2) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, (3) masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu Kependudukan, (4) masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga Kencana antara wilayah perdesaan- perkotaan maupun antar tingkat pendidikan, (5) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai KB yang belum

responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB, (6) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal, dan (7) peran bidang dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain : (1) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*), (2) Rendahnya kesertaan KB pria, (3) kualitas pelayanan KB (*supply side*) belum sesuai standar, yaitu berkaitan

dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (*supply chains*), (4) jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB.

Peningkatan pelayanan dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja antara lain: (1) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun) , (2) tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja yang berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi, (3) pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko rendah, dan (4) cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) belum optimal.

Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Dalam rangka pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi juga pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain: (1) pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah, (2) partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah, (3) kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal, (4) terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga, (5) pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam

mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB . disamping itu juga Kelompok Kegiatan/Poktan, yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA) dan (6) terbatasnya materi program Bangga Kencana dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan

Beberapa permasalahan di atas harus dijadikan fokus dalam perumusan arah kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan 5 (Lima) tahun kedepan (2025-2029).

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Tujuan 1 : Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera Sasaran 1: Meningkatnya Keluarga Berkualitas	Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Belum optimalnya komitmen dan dukungan stakeholders terhadap program Bangga Kencana, yaitu terkait penganggaran di Kabupaten
			Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif
			Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu Kependudukan,
			Masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program Bangga Kencana antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan
			Pelaksanaan advokasi dan KIE

			mengenai KB yang belum responsif gender, tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB
			Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal
			Peran bidang dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.
		Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
			Rendahnya kesertaan KB pria
			Kualitas pelayanan KB (<i>supply side</i>) belum sesuai standar, yaitu berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan tentang pilihan metode KB secara komprehensif termasuk mengenai efek samping alokon dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan.

			Selanjutnya yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di fasilitas kesehatan (faskes)/klinik pelayanan KB (<i>supply chains</i>)
			Jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB
		Peningkatan pelayanan dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan	Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun)
			Tingginya perilaku seks pranikah di sebagian kalangan remaja yang berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi
			Pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku beresiko rendah
			Cakupan dan peran Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) belum optimal.
		Pembangunan Keluarga	Pengetahuan orang

		melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga	tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah
			Partisipasi, pemahaman dan kesadaran keluarga / orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah
			Kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal
			Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga
			Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB . disamping itu juga Kelompok Kegiatan/Poktan,

			yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)
			Terbatasnya materi program Bangga Kencana dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) periode tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana (RPJPD-SB) Tahunan 2025-2045. Periode ini diarahkan untuk penguatan transformasi dengan arah kebijakan pada pemenuhan standar pelayanan minimal, membangun kemandiri ekonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, penguatan ketahanan daerah melalui ketahanan adat dan budaya, serta menjaga kelestarian alam dan lingkungan Kabupaten Tabanan. Sejalan dengan hal tersebut, dan hasil pemetaan permasalahan dan isu strategis pada uraian sebelumnya selanjutnya dijadikan acuan dalam merancang visi dan misi Kabupaten Tabanan 5 (lima) tahun ke depan dengan mengedepankan kearifan lokal sebagai pondasi pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip satu pulau satu tata kelola (*one island one management*). RPJMD Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029, dalam penyusunannya selain menggunakan 7 (tujuh) pendekatan, juga memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal Bali Sat Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagatkerthi*) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.

3.1.1 Visi

Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan lokal, kondisi saat ini dan tantangan masa depan, serta menjamin keberlanjutan pemebangunan maka visi jangka menengah Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 adalah :

VISI:

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945

serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani (AUM) diterjemahkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Tabanan dengan menjamin rasa aman masyarakat Tabanan dan meningkatkan keunggulan daerah atas 5 (lima) bidang prioritas yang didukung 2 (dua) bidang penunjang yaitu :

1. Bidang Pangan, Sandang dan Papan
2. Bidang Kesehatan dan Pendidikan
3. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Bidang Pariwisata
5. Bidang Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
6. Bidang Infrastruktur Fisik dan Digital
7. Bidang Lingkungan Hidup

Tabanan Aman, dimaknai sebagai terpenuhinya hak dasar bagi setiap individu dalam menjalankan swadarmanya yang diwujudkan dalam pemenuhan hak pelayanan dasar warga, pembangunan yang berorientasi pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang didukung infrastruktur yang memadai. Tabanan aman ditandai dengan nilai SPM, Indek Lingkungan Hidup, dan Indek Kepuasan Infrastruktur Daerah.

Tabanan Unggul, dimaknai sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) Tabanan yang memiliki daya saing tinggi di segala bidang dengan yang mampu menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki untuk kemajuan daerah yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

Nilai nilai, norma, hukum. Tabanan unggul ditandai dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Nilai SPBE.

Tabanan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan, yang ditandai dengan Indeks Ketahanan Pangan, Nilai

Tambah Petani dan Nelayan, indeks pembangunan kebudayaan.

Sebagaimana makna Tabanan Aman, Unggul dan Madani (AUM), maka dalam implementasinya berpedoman pada 3 (tiga) dimensi utama yaitu :

1. Dimensi Pertama, terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)
 - a. Terpeliharanya Alam Tabanan secara sekala dan niskala yang diwujudkan dengan memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumber mata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.

- b. Mengembangkan jati diri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
 - c. Memajukan kebudayaan bali dari hulu sampai ke hilir yang menjiwai seluruh aspek pembangunan di Tabanan meliputi : adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
2. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan meliputi kebutuhan dasar masyarakat tabanan meliputi :
 - a. Terpenuhinya pangan, sandang dan papan;
 - b. Terpenuhinya pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang memadai;
 - c. Terpenuhinya jaminan sosial, dan perlindungan tenaga kerja yang merata dan berkeadilan;
 - d. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
 - e. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
 - f. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.
3. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran

lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negatif terhadap kondisi di masa yang akan datang, melalui :

- a. Penguatan dan pelebagaan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
- b. Pengarusutamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
- c. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.
- d. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindh terhadap Bali. 5. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat Tabanan.

3.1.2 Misi

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan Tabanan 2025-2029, yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan menjamin hak setiap rakyat melalui jalan Tri Sakti (berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan) atas : Pangan, Sandang, dan Papan; Pendidikan Dan Kesehatan; Jaminan Sosial, dan Ketenagakerjaan; Adat, Agama, Tradisi, Seni, dan Budaya; dan Pariwisata, maka ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri. Pondasi pembangunan Tabanan terletak pada sumber daya manusianya. Pada misi ini dimaknai sebagai upaya untuk meningkatkan sumberdaya manusia Tabanan melalui pendidikan formal, informal dan non formal, serta pendidikan vokasi

dengan muatan lokal untuk membentuk jati diri manusia Tabanan sehingga mampu menggerakkan sumberdaya ekonomi.

Misi 2 : Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani. Akses kesehatan merupakan pemenuhan atas hak dasar masyarakat untuk mendukung produktivitas. Jaminan kesehatan yang berkualitas, merata dan berkeadilan melalui menyediakan layanan kesehatan primer terpadu dan keterlibatan keluarga untuk terwujudnya keluarga sehat dan berkualitas.

Misi 3 : Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan. Pendekatan ekonomi kerakyatan sejatinya merupakan kekuatan dalam membangun perekonomian daerah. Kekuatan ekonomi kerakyatan terletak pada kemampuan dalam pengelolaan potensi oleh desa melalui penguatan kelembagaan baik koperasi, BUMDes, dan perluasan akses permodalan bagi UMKM untuk tumbuh bersama demi mewujudkan keadilan sosial.

Misi 4 : Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal, Dengan karakteristik wilayah yang dimiliki, Tabanan memiliki potensi sumber daya yang cukup besar, potensi pertanian dan pariwisata sangat menonjol bahkan menjadi icon Bali, ini merupakan

modal bagi Tabanan untuk membangun kemandirian ekonomi melalui upaya pengembangan kawasan hilirisasi komoditas unggulan potensial, menjamin rantai pasar, dan terus menjaga iklim investasi yang kondusif.

Misi 5 : Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin HakHak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban. Upaya Pemerintah Tabanan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan tidak diskriminatif sebagai kebutuhan untuk menjamin hak masyarakat. Upaya ini tentunya membutuhkan birokrasi yang efektif, efisien, bersih, bebas korupsi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Misi 6 : Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia. Adat, tradisi, seni dan budaya yang dimiliki sesungguhnya adalah kekuatan dalam menjaga toleransi berkehidupan kebinekaan untuk mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam falsafah masyarakat Bali yaitu Tri Hita Karana. Oleh karena itu, nilai-nilai warisan para leluhur perlu terus digali dan dilestarikan sehingga alam, manusia dan budaya bali dapat terus terjaga.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran pembangunan di sektor Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tabanan periode 2021-2026 disusun berdasarkan pada Visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan terpilih

yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Arah pembangunan kependudukan Kabupaten Tabanan juga disinergikan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi termasuk Rencana Strategis (RENSTRA) Kementrian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Bali.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang telah dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Tabanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai peran dalam pembangunan di Kabupaten Tabanan yaitu berada pada :

Misi 2 : Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani.

Tujuan 2.2. Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera

Dengan mengacu pada Tujuan dan sasaran tersebut dan mensinergikan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan Kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan kependudukan di Kabupaten Tabanan dalam Ranwal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan periode 2025-2029 selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD menjadi 1 Tujuan dan 1 sasaran yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatnya Kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera

Sasaran 1 : Meningkatnya Keluarga Berkualitas

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DALAM BALI ERA BARU DI KABUPATEN TABANAN, TABANAN ERA BARU AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)											
Misi 1. Meningkatkan Pembangunan Manusia yang Produktif, Berkualitas dan Berkepribadian Untuk Siap Kerja dan Siap Merintis Usaha Sendiri. 2. Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan Manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani. 3. Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Kebijakan yang Memperkuat Kapasitas Ekonomi Rakyat, Termasuk Kapasitas Produksi Pangan oleh Petani dan Nelayan, serta Mendukung Kegiatan Ekonomi Skala Kecil-Menengah yang Inklusif dan Kreatif. 4. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal 5. Setia Pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila, UUD 1945, Menjunjung Tinggi Hukum Demi Menjamin Hak-Hak Rakyat, serta Menjalankan Tata Pemerintahan Daerah yang Bersih, Bebas dari Korupsi dan Berkeadaban. 6. Memajukan Kebudayaan Setempat dalam Semangat Kebhinekaan dan Toleransi serta Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Warisan Leluhur Bangsa Indonesia.											
RPJMD SB KABUPATEN TABANAN		RANCANGAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TABANAN									
Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional Sumber Data Target Kinerja	TARGET KINERJA SASARAN PADA DPPKB TAHUN KE-						
					Target Kinerja						
					Kondisi awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tujuan 2.2 : Meningkatnya kesehatan keluarga untuk menciptakan keluarga berkualitas, harmonis dan sejahtera Sasaran 2.2.3 : Meningkatnya keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Persentase Masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	Tujuan : Terwujudnya Keluarga yang berkualitas Sasaran : Masyarakat yang terpapar program Bangga Kencana	1.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)	Data Kemenduk Bangga/BKKBN	1,84	1,84	1,86	1,87	1,89	1,90	2,00
			2.Indeks Lansia Berdaya	Data Kemenduk Bangga/BKKBN	71,4	71,4	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9
			3.Indek pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja	Data Kemenduk Bangga/BKKBN	89,8	89,8	89,9	90,00	90,1	90,2	90,3

			4.Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Data Kemenduk Bangga/BKKBN	13,00	13,00	12,88	12,75	12,63	12,50	12,43
			5.Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	Data Kemenduk Bangga/BKKBN	11,00	11,00	10,08	10,06	10,04	10,02	10,00
			6.Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	Data Kemenduk Bangga/BKKBN	61,10	61,10	60,90	60,85	60,85	60,73	60,75
			7.proporsi Kebutuhan Ber Kb yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Data Kemenduk Bangga/BKKBN	73,80	73,80	73,90	74,00	74,10	74,20	74,30
			8.Persentase Kampung Keluarga berkualitas yang mandiri	Data Kemenduk Bangga/BKKBN	30,82	30,82	42,11	53,38	64,66	75,94	87,22

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang dibuat secara lengkap dan komprehensif yang memuat tata cara Pemerintah Kabupaten Tabanan mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu strategis yang telah disepakati. Strategi pembangunan daerah dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan program-program yang diprioritaskan oleh Kepala Daerah. Strategi tersebut diperjelas dengan arah kebijakan agar rumusan strategi memiliki fokus dan target pelaksanaan dalam lima tahun ke depan.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam Ranwal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

RANCANGAN RENSTRA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
TABANAN 2025-2029

Tabel 3.3

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah kebijakan
Memastikan Akses Kesehatan untuk Rakyat Guna Menciptakan manusia Indonesia yang Sehat Jasmani dan Rohani	Meningkatnya kesehatan kelurga untuk menciptakan keluarga berkualitas, haramonis, dan sejahtera	Meningkatnya Keluarga Berkualitas	1. Pengendalian Kuantitas Penduduk dan meningkatkan Kualitas Penduduk (Keluarga)	1.Peningkatan Pembinaan dan Penyuluhan Keluarga Berkualitas 3. Presentase Keluarga yang mengikuti Program Tri Bna Keluarga (BKB,BKL, BKR, Genre, PIK-R, UPPKA

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah merupakan langkah berikutnya dalam menterjemahkan visi misi Kepala Daerah terpilih ke dalam program-program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Kebijakan umum dan program pembangunan perangkat daerah merupakan suatu jembatan konseptual yang menghubungkan rumusan tujuan jangka menengah dengan capaian pembangunan jangka pendek atau tahunan. Dengan adanya kebijakan umum dan program pembangunan daerah, sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam sebelumnya akan dijabarkan ke dalam indikator kinerja sasaran. Capaian kinerja sasaran ini diukur melalui indikator program yang menjadi bidang dan tanggung jawab Perangkat Daerah dalam melaksanakan program tersebut. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TABANAN**

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	5.360.079.000	100%	5.939.211.466	100%	6.278.524.264	100%	6.639.037.925	100%	7.042.275.395	100%	7.571.518.371
2.14..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	4.500.000	3 Dokumen	4.500.000	3 Dokumen	4.500.000	3 Dokumen	4.500.000	3 Dokumen	4.500.000

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2024)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2030)	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.14..01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000	2 Dokumen	2.500.000
2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi	1 Laporan	1 Laporan	4.556.019.000	1 Laporan	5.437.412.666	1 Laporan	5.706.924.264	1 Laporan	6.005.037.925	1 Laporan	6.394.875.395	1 Laporan	6.911.718.371
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	26 orang	4.556.019.000	26 orang	5.434.412.666	27 orang	5.703.924.264	28 orang	6.002.037.925	29 orang	6.391.675.395	30 orang	6.908.218.371
2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan	2.000.000	3 laporan	3.000.000	3 laporan	3.000.000	3 laporan	3.000.000	3 laporan	3.200.000	3 laporan	3.500.000
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	126.088.500	1 Laporan	139.298.800	1 Laporan	147.500.000	1 Laporan	155.800.000	1 Laporan	161.100.000	1 Laporan	167.400.000
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	7.498.600	1 Paket	7.498.800	1 Paket	7.600.000	1 Paket	7.800.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.200.000

2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.499.400	1 Paket	2.800.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.200.000	1 Paket	3.400.000	1 Paket	3.600.000
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	18.000.000,	1 Paket	20.000.000	1 Paket	22.000.000	1 Paket	24.000.000	1 Paket	26.000.000	1 Paket	28.000.000
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	2.995.500	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.200.000	1 Paket	3.400.000	1 Paket	3.600.000	1 Paket	3.800.000
2.14.01.2.06.0007	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,	1 Paket	15.500.000	1 Paket	16.000.000	1 Paket	16.500.000	1 Paket	17.000.000	1 Paket	17.500.000
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	75.095.000	1 laporan	85.000.000	1 laporan	90.000.000	1 laporan	95.000.000	1 laporan	97.000.000	1 laporan	100.000.000
2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	5.700.000	1 Dokumen	5.900.000	1 Dokumen	6.100.000	1 Dokumen	6.300.000
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis barang kantor terpenuhi kebutuhannya	3 unit	3 unit	99.469.800	3 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	12.000.000	5 unit	13.000.000	5 unit	14.000.000
2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis barang kantor terpenuhi kebutuhannya	3 unit	3 unit	99.469.800	3 unit	10.000.000	5 unit	10.000.000	5 unit	12.000.000	5 unit	13.000.000	5 unit	14.000.000
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa kantor yang terpenuhi kebutuhannya	1 laporan	1 laporan	462.589.500	1 laporan	298.500.000	1 laporan	351.600.000	1 laporan	401.700.000	1 laporan	403.800.000	1 laporan	403.900.000
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	3.500.000	1 laporan	3.500.000	1 laporan	3.600.000	1 laporan	3.700.000	1 laporan	3.800.000	1 laporan	3.900.000

2.14.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	41.492.000	1 laporan	45.000.000	1 laporan	48.000.000	1 laporan	48.000.000	1 laporan	50.000.000	1 laporan	50.000.000
2.14.01.2.08.000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	417.597.500	1 laporan	250.000.000	1 laporan	300.000.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	350.000.000	1 laporan	350.000.000
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang kantor yang terpenuhi pemeliharaannya	4 Unit	5 Unit	207.882.000	6 unit	50.000.000	6 unit	58.000.000	7 unit	60.000.000	7 unit	65.000.000	8 unit	70.000.000
2.14.01.2.09.000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit	5 Unit	187.992.000	6 Unit	25.000.000	6 Unit	30.000.000	7 Unit	30.000.000	7 Unit	35.000.000	8 Unit	30.000.000
2.14.01.2.09.000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	5 Unit	19.890.000	6 Unit	25.000.000	6 Unit	28.000.000	6 Unit	30.000.000	7 Unit	30.000.000	7 Unit	30.000.000
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalnya Pertambahan Jumlah Penduduk			285.000.000		285.000.000		301.282.321		318.581.990		337.931.811		363.328.153
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Peta Jalan pembangunan kependudukan	1 dokumen	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	151.282.321	1 dokumen	158.581.990	1 dokumen	167.931.811	1 dokumen	183.328.153
2.14.02.2.01.00 25	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	151.282.321	1 dokumen	158.581.990	1 dokumen	167.931.811	1 dokumen	183.328.153

2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Keluarga (verval) Verifikasi dan validasi data keluarga	1 dokum en	1 dokum en	120.000.00 0	1 dokumen	120.000.000	1 dokume n	151.282.321	1 dokumen	158.581.990	1 dokume n	167.931.811	1 dokum en	183.328.153
2.14.02.2.02.001 2	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	151.282.321	1 Laporan	158.581.990	1 Laporan	167.931.811	1 Laporan	183.328.153
2.14.02.2.02.001 3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			120.000.000										
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya Pemberdayaan dan peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan keluarga Berencana			2.952.226.5 00		2.780.939.0 00		2.939.816.68 9		3.108.621.337		3.297.430.7 12		3.545.240.112
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentasi kader Kb yang diberikan Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	1 Laporan	1 Laporan	1.116.831.0 00	1 Laporan	1.135.000.0 00	1 Laporan	1.217.000.00 0	1 Laporan	1.329.000.000	1 Laporan	1.630.000.0 00	1 Laporan	1.800.000.000
2.14.03.2.01.001 0	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	486.842.000	1 Laporan	470.000.000	1 Laporan	490.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	520.000.000	1 Laporan	550.000.000
2.14.03.2.01.001 1	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat	1 Laporan	1 Laporan	199.989.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	220.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	270.000.000	1 Laporan	300.000.000

	(Minilok)	Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)													
2.14.03.2.01.001 2	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 dokum en	1 dokum en	125.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokume n	127.000.000	1 dokumen	129.000.000	1 dokume n	320.000.000	1 dokum en	350.000.000
2.14.03.2.01.001 3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	1 organis asi	1 organis asi	105.000.000	1 organisasi	120.000.000	1 organisa si	130.000.000	1 organisasi	150.000.000	1 organisa si	170.000.000	1 organis asi	200.000.000
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase PKB/PLKB yang mendapat Penguatan KKBP	1 dokum en	1 dokum en	1.159.914.0 00,00	1 dokumen	675.939.000	1 dokume n	727.816.689	1 dokumen	730.621.337	1 dokume n	984.030.712	1 dokum en	636.240.112
2.14.03.2.02.000 2	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	1 unit	1 unit	1.635.000.0 00	1 unit	200.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	300.000.000	1 unit	400.000.000	1 unit	400.000.000
2.14.03.2.02.000 4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1200 orang	1330 orang	1.159.914.0 00	1350 orang	475.939.000	1400 orang	427.816.689	1400 orang	430.621.337	1430 orang	584.030.712	1500 orang	236.240.112
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PUS yang terlayani KB	1 laporan	1 laporan	508.481.500	1 laporan	490.000.000	1 laporan	535.000.000	1 laporan	569.000.000	1 laporan	183.400.000	1 laporan	599.000.000

2.14.03.2.03.000 1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	63.892.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	35.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	45.000.000	1 laporan	50.000.000
2.14.03.2.03.000 3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500 orang	2718 orang	339.171.000	2719 orang	350.000.000	2850 orang	380.000.000	2853 orang	400.000.000	2800 orang	400.000.000	2800 orang	400.000.000
2.14.03.2.03.000 6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 unit	1 unit	30.000.000	1 unit	35.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	42.000.000	1 unit	45.000.000	1 unit	48.000.000
2.14.03.2.03.000 8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 laporan	1 laporan	45.195.000	1 laporan	30.000.000	1 laporan	33.000.000	1 laporan	37.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	43.000.000
2.14.03.2.03.001 1	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	1 laporan	1 laporan	30.223.500	1 laporan	30.000.000	1 laporan	33.000.000	1 laporan	37.000.000	1 laporan	40.000.000	1 laporan	43.000.000
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)			167.000.000		460.000.000		480.000.000		480.000.000		500.000.000		510.000.000
2.14.03.2.04.000 6	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,	18 kampung	36 kampung	152.000.000	50 kampung	400.000.000	80 kampung	410.000.000	100 kampung	410.000.000	120 kampung	420.000.000	133 kampung	430.000.000

		Kependudukan, dan Keluarga Berencana)													
2.14.03.2.04.000 7	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 dokum en	1 dokum en	15.000.000	1 dokumen	60.000.000	1 dokume n	70.000.000	1 dokumen	70.000.000	1 dokume n	80.000.000	1 dokum en	80.000.000
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	1 laporan	1 laporan	2.702.148.0 00,00	1 laporan	1.193.000.0 00	1 laporan	1.261.157.22 4	1 laporan	1.333.573.032	1 laporan	1.414.570.7 04	1 laporan	1.520.878.902
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peningkatan Pembinaan Keahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 laporan	1 laporan	2.702.148.0 00,00	1 laporan	1.193.000.0 00	1 laporan	1.261.157.22 4	1 laporan	1.333.573.032	1 laporan	1.414.570.7 04	1 laporan	1.520.878.902
2.14.04.2.01.001 5	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	0 kelomp ok	2 kelomp ok	0	2 kelompok	200.000.000	3 kelomp ok	250.000.000	4 kelompok	300.000.000	5 kelomp ok	350.000.000	6 kelomp ok	400.000.000
2.14.04.2.01.001 7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 laporan	1 laporan	45.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	130.000.000	1 laporan	150.000.000	1 laporan	180.000.000	1 laporan	200.000.000
2.14.04.2.01.001 8	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	10 unit	10 unit	300.000.000	10 unit	300.000.000	12 unit	350.000.000	15 unit	400.000.000	17 unit	450.000.000	18 unit	500.000.000

2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		100 orang	85.000.000	120 orang	458.000.000	140 orang	364.157.224	160 orang	293.573.032	180 orang	221.570.704	200 orang	199.878.902
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Terlibat dalam Peningkatan peserta KB Aktif	1 laporan	1 laporan	2.442.148.000	1 laporan	508.000.000	1 laporan	564.157.224	1 laporan	393.573.032	1 laporan	821.420.704	1 laporan	749.878.902
2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan	1 laporan	1.068.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000	1 laporan	100.000.000
2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	1 laporan	1 laporan	1.281.600.000	1 laporan	408.000.000	1 laporan	464.157.224	1 laporan	293.573.032	1 laporan	721.420.704	1 laporan	649.878.902

4.2Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Masyarakat yang Terjangkau Program Bangga Kencana	Angka	86,50	86,60	86,70	86,80	86,90	87	

4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN					
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	1,84	1,86	1,87	1,89	1,90	2,00
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	61,10	60,90	60,85	60,80	60,75	60,73
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	11,00	10,08	10,06	10,04	10,02	10,00
4	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	73,80	73,90	74,00	74,10	74,20	74,30
5	Age Spesifik Fertility Rate (ASFR) 15-19 th	13,00	12,88	12,75	12,63	12,50	12,43
6	Indeks lansia berdaya	71,4	71,5	71,6	71,7	71,8	71,9
7	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	89,8	89,9	90,0	90,1	90,2	90,3
8	Prosentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	15,0	17,0	19,0	21,0	23,0	25,0

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 memiliki peran strategis dalam pembangunan kependudukan di Kabupaten Tabanan. Ranwal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabanan, RPJPD Kabupaten Tabanan dan RPJMN pemerintah pusat.

Dokumen Rancangan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dalam menyusun Renja mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Disamping itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan juga harus berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tabanan.